

## Daftar Pustaka

- Arrasjid, C. (2000). *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. (2013). *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bayu, C. (2021, Juni). Transformasi Kelembagaan KPK : UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, XXIII(1), 84-97.
- Endarto. (2014). Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, I(3), 6.
- Faiz, P. M. 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 139.
- Fiedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Halim, F., & Firdaus, E. (2021, Juni 1). *Daftar 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan Jabatannya*. Dipetik Agustus 14, 2021, dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1376652-daftar-75-pegawai-kpk-yang-tak-lulus-twk-dan-jabatannya>
- Isra, S. (2016). Pendapat. Dalam Z. A. Mochtar, *Lembaga Negara Independen* (hal. 266). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaligis, R. V. (2020). Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kpk Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 140-150.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- L.J, V. A. (1996). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam. *Jakarta : Pradnya Paramita*, 11-12.
- Machmudin, D. D. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maharani, T. (2021, Juni 22). *Survei : Kepercayaan Publik Terhadap KPK Lebih rendah dari Polri*. Dipetik Agustus 12, 2021, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/11042211/survei-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-lebih-rendah-dari-polri?page=all>
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca - Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nusanto, I. A. (2021). Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1), 53-68.
- Novianti. (2021). Parliamentary Review : Dampak Hukum Alih Status Kepegawaian KPK. *Parlementary Review* 3(3). ISSN: 2656-923, 111-119.
- Rawls, J, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90
- Rizal, K. (2011). *Kekuatan pembuktian otopsi forensik dalam kasus pembunuhan: studi komparatif hukum acara pidana Islam dan KUHP* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rumokoy, D. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi, dan Regulasi. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 15(3), 249-262
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15
- Soemitro, R.H. (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm.37
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- User, S. (2016, Januari 6). *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Dipetik Agustus 12, 2021, dari ACCH (Anti - Corruption Clearing House: <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- Wahyumingrum, K. S. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada? *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, IV(2).
- Wulandari, W. S. (2021). *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah*. Riau: UIN Suska Riau.
- Yasin, J, 2009, *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, Journal Syiar Hukum, Vol.11 No.2, 2009, pp. 147-

160. <https://www.neliti.com/publications/25229/hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon#cite>  
Peraturan Perundang-Undangan  
*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.*  
*Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 tentang*  
*Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.*  
*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*  
*Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020.*  
Keputusan Presiden No 73 Tahun 2003

#### Website

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/15/firli-ungkap-ada-orang-besar-minta-lepas-pengawasan-penyidik-kpk-saat-menangani-kasus>. Di akses pada tanggal 27 Nov. 21. Pukul 12.00.  
<https://news.detik.com/berita/d-5818865/arteria-dahlan-minta-penegak-hukum-tak-kena-ott-kpk-tak-setuju>. Di akses pada 25 Nov. 21. Pukul 14.00.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56968002>. Di akses pada 25 Nov. 21. Pukul 14.00.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/16212971/menurut-icw-ini-3-faktor-penyebab-turunnya-kepercayaan-publik-pada-kpk?page=all>. Di akses pada 23 Nov. 21. Pukul 13.00.  
<https://www.merdeka.com/agus-rahardjo/profil/>. Di akses pada 23 Nov. 21. Pukul 13.00.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/15175801/kepercayaan-publik-terhadap-kpk-terendah-pukat-ugm-pengeroposan-dari-dalam?page=all>. Di akses pada 23 Nov. 21. Pukul 13.00.  
<https://www.beritasatu.com/nasional/781297/firli-bahuri-tegaskan-alih-status-pegawai-kpk-menjadi-asn-amanat-uu>. Di akses pada 17 Nov. 21. Pukul 15.00.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/23225731/hakim-mk-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn-harus-dipandang-peralihan-bukan?page=all>. Di akses pada 17 Nov. 21. Pukul 15.00.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210626212606-20-659818/kpk-buka-suara-soal-permintaan-novel-dkk-beberkan-hasil-twk>. Di akses pada 17 Nov. 21. Pukul 15.00.  
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1376652-daftar-75-pegawai-kpk-yang-tak-lulus-twk-dan-jabatannya>. Di akses pada 14 Agustus 2021. Pukul 14.00.  
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1376652-daftar-75-pegawai-kpk-yang-tak-lulus-twk-dan-jabatannya>. Di akses pada 14 Agustus 2021. Pukul 14.00.

*[https://ombudsman.go.id/faq#:~:text=Ombudsman%20adalah%20lembaga%20negara%20yang,\(BHMN\)%20serta%20badan%20swasta%2F](https://ombudsman.go.id/faq#:~:text=Ombudsman%20adalah%20lembaga%20negara%20yang,(BHMN)%20serta%20badan%20swasta%2F). Di akses pada 12 Agustus 2020. Pukul 20.00.*

*<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>. Di akses pada 12 Agustus 2021. Pukul 20.00.*

*<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/11042211/survei-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-lebih-rendah-dari-polri?page=all>. Di akses pada 12 Agustus 2021. Pukul 20.00.*

*<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik>. Di akses pada 12 Agustus 2021. Pukul 20.00.*

*<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>. Di akses pada 12 Agustus 2021. Pukul 20.00.*